

Pandangan Masyarakat Terhadap Demokrasi Saat Ini yang Terjadi di Lingkungan Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan

Fernando Pretito Arnold Runtuwene¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606003@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO Article history: Received March 14, 2025 Accepted March 25, 2025 Published May 30, 2025 Kata Kunci: Demokrasi Lokal, Partisipasi Masyarakat, Desa, Budaya Politik, Minahasa Selatan 	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan terhadap demokrasi yang terjadi di lingkungan mereka. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap warga masyarakat yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Poopo Barat memiliki pandangan positif terhadap demokrasi dan telah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial sehari-hari melalui tradisi gotong royong dan musyawarah. Masyarakat menunjukkan toleransi politik yang tinggi dan kemampuan mengelola perbedaan secara konstruktif. Pemerintahan desa yang demokratis telah berhasil menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki harapan besar agar demokrasi terus berkelanjutan melalui komitmen bersama dan penanaman nilai demokrasi kepada generasi muda. Integrasi nilai demokrasi modern dengan kearifan lokal Minahasa menjadi kekuatan dalam keberlanjutan demokrasi di tingkat desa.
Abstract <i>This study aims to analyze the views of the people of West Poopo Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency, regarding democracy in their environment. The research method used a qualitative approach with data collection techniques through observation and in-depth interviews with residents selected purposively. Data analysis was conducted using the qualitative descriptive technique of the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the people of West Poopo Village have a positive view of democracy and have internalized democratic values in their daily social lives through the traditions of mutual cooperation and deliberation. The community demonstrates high political tolerance and the ability to manage differences constructively. Democratic village governance has succeeded in creating stability and community welfare. The community has high hopes for the sustainability of democracy through a shared commitment and instilling democratic values in the younger generation. The integration of modern democratic values with local Minahasan wisdom is a strength in the sustainability of democracy at the village level.</i>	Keywords: Local Democracy, Community Participation, Village, Political Culture, South Minahasa

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat telah menjadi pilihan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sejak era reformasi

1998. Menurut Dahl (2001), demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, implementasi demokrasi telah mengalami berbagai dinamika, mulai dari tingkat nasional hingga desa, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki persepsi dan pengalaman yang berbeda terhadap praktik demokrasi. Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang dengan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk budaya, ekonomi, dan struktur sosial masyarakat setempat. Pandangan masyarakat terhadap demokrasi sangat penting untuk dipahami karena hal ini mencerminkan legitimasi dan efektivitas sistem politik yang berjalan, serta menjadi indikator kualitas demokrasi di tingkat grassroot.

Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya Desa Poopo Barat di Kecamatan Ranoyapo, merupakan salah satu wilayah yang mengalami transformasi politik pasca desentralisasi dan otonomi daerah. Sutiyo dan Maharjan (2017) menyatakan bahwa otonomi desa memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan lokal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi politik dan dominasi elite lokal. Masyarakat desa di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, memiliki karakteristik khas dengan sistem nilai dan norma yang masih kental dengan tradisi dan kearifan lokal, yang dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap demokrasi modern (Antlov, 2003). Di sisi lain, penetrasi informasi melalui media sosial dan teknologi komunikasi telah membuka akses masyarakat desa terhadap diskursus politik yang lebih luas, sehingga menciptakan dinamika baru dalam pandangan mereka terhadap praktik demokrasi.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana masyarakat Desa Poopo Barat memaknai dan menilai demokrasi yang berlangsung saat ini, terutama dalam konteks partisipasi politik, transparansi pemerintahan desa, dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Pratikno (2005) mengungkapkan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memandang dan terlibat dalam proses politik di lingkungannya. Fenomena politik uang, politik identitas, dan oligarki lokal yang kerap terjadi dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan umum dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap demokrasi (Aspinall dan Sukmajati, 2016). Oleh karena itu, penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap demokrasi di Desa Poopo Barat menjadi penting untuk memahami realitas demokrasi di tingkat desa dan merumuskan strategi penguatan demokrasi yang sesuai dengan konteks lokal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia dengan berbagai fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Savirani dan Tornquist (2015) tentang "Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia" menemukan bahwa masyarakat di tingkat lokal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap demokrasi, namun sering kali kecewa dengan praktik politik yang masih didominasi oleh elite dan tidak memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Penelitian tersebut menunjukkan adanya gap antara harapan dan realitas demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan cenderung pragmatis. Studi lain oleh Vel dan Bedner (2015) yang berjudul "Decentralisation and Village Governance in Indonesia" menganalisis bagaimana desentralisasi mempengaruhi tata kelola desa dan partisipasi politik masyarakat, dengan temuan bahwa meskipun desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada desa, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kapasitas pemerintah desa yang terbatas dan kurangnya kesadaran politik masyarakat.

Penelitian Warburton (2016) tentang "Political Culture in Indonesia" mengeksplorasi bagaimana budaya politik masyarakat Indonesia mempengaruhi praktik demokrasi, dengan menekankan bahwa nilai-nilai tradisional seperti patron-klien dan harmoni sosial sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menekankan kompetisi dan

akuntabilitas. Studi ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal yang membentuk cara berpikir dan berperilaku politik mereka. Lebih lanjut, penelitian oleh Hadiz (2010) dalam bukunya "Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia" menunjukkan bahwa demokratisasi di tingkat lokal justru memperkuat oligarki dan politik predatori, di mana elite lokal memanfaatkan institusi demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah sering kali memandang demokrasi sebagai arena kontestasi elite yang jauh dari aspirasi dan kebutuhan rakyat biasa.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan terkait persepsi masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia, sebagian besar studi tersebut masih terfokus pada wilayah perkotaan atau daerah dengan karakteristik heterogen yang tinggi, sementara kajian mendalam tentang pandangan masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya di daerah pinggiran seperti Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan makro dalam menganalisis demokrasi lokal, sehingga kurang menangkap dinamika dan nuansa spesifik yang terjadi di tingkat desa. Padahal, konteks lokal memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi dan praktik demokrasi, termasuk pengaruh struktur sosial tradisional, kearifan lokal, dan pola hubungan masyarakat dengan pemerintah desa yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada aspek institusional dan perilaku elite politik, namun kurang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana masyarakat biasa di level akar rumput memahami, mengalami, dan menilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gap ini penting untuk diisi karena pandangan masyarakat desa terhadap demokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh proses formal seperti pemilihan umum, tetapi juga oleh pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan pemerintah desa, akses terhadap pelayanan publik, serta keterlibatan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji pandangan masyarakat Desa Poopo Barat terhadap demokrasi menjadi urgen untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang realitas demokrasi di tingkat grassroot.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap pandangan masyarakat di Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai representasi komunitas pedesaan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang unik. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung generalisasi, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana konteks lokal Minahasa, dengan sistem nilai torang samua basudara (kita semua bersaudara) dan tradisi mapalus (gotong royong), mempengaruhi cara masyarakat memandang dan mempraktikkan demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini akan menangkap narasi dan pengalaman langsung masyarakat dalam menghadapi dinamika politik lokal, termasuk praktik demokrasi desa seperti Musyawarah Desa (Musdes), pemilihan kepala desa, dan partisipasi dalam program pembangunan desa.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana penetrasi teknologi informasi dan media sosial mempengaruhi pandangan masyarakat desa terhadap demokrasi di era digital saat ini, sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks pedesaan di Indonesia Timur. Dengan menggabungkan perspektif tradisional dan modern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami kompleksitas demokrasi di tingkat desa, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal untuk penguatan demokrasi partisipatif. Kebaruan lainnya adalah penelitian ini akan

mengidentifikasi potensi model demokrasi lokal yang berbasis kearifan lokal Minahasa, yang dapat menjadi alternatif atau pelengkap bagi model demokrasi liberal yang selama ini menjadi mainstream dalam diskursus politik Indonesia.

Realitas demokrasi yang terjadi di Desa Poopo Barat saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana di satu sisi terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik formal seperti pemilihan kepala desa dan pemilihan umum, namun di sisi lain masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya demokrasi yang substansial. Pengamatan awal menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan, namun partisipasi tersebut lebih didorong oleh faktor pragmatis seperti hubungan kekerabatan, janji bantuan material, atau ikatan patron-klien, daripada kesadaran politik yang matang. Fenomena politik uang masih menjadi isu yang sensitif namun nyata dalam kontestasi politik lokal, yang pada akhirnya dapat menggerus makna demokrasi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Di sisi lain, masyarakat Desa Poopo Barat juga menunjukkan kritisisme yang semakin meningkat terhadap kinerja pemerintah desa, terutama terkait transparansi pengelolaan dana desa dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Media sosial dan grup WhatsApp warga menjadi ruang baru untuk diskusi politik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa, yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif tetapi mulai aktif menuntut akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap demokrasi dengan realitas yang mereka alami, di mana banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, dan Musyawarah Desa sering kali hanya menjadi formalitas tanpa memberikan ruang partisipasi yang bermakna. Kondisi ini mencerminkan bahwa demokrasi di tingkat desa masih dalam proses konsolidasi, yang memerlukan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat Desa Poopo Barat terhadap demokrasi yang terjadi di lingkungan mereka. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial, dalam hal ini persepsi masyarakat tentang praktik demokrasi di tingkat desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dan nuansa pandangan masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta memberikan ruang bagi informan untuk mengekspresikan pengalaman dan pemahaman mereka tentang demokrasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bogdan dan Biklen (2007) menekankan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambar, bukan angka, sehingga sangat relevan untuk mengkaji fenomena sosial-politik seperti demokrasi di tingkat grassroot.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk menggali informasi dari masyarakat Desa Poopo Barat. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, interaksi sosial, dan praktik demokrasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam kegiatan musyawarah desa, gotong royong, dan aktivitas politik lokal. Menurut Spradley (1980), observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat, sehingga dapat memberikan interpretasi yang lebih akurat terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu warga masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik demokrasi di desa, termasuk tokoh masyarakat,

perangkat desa, dan warga biasa yang aktif dalam kegiatan sosial-politik. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan dengan pedoman wawancara yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan respons informan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dikumpulkan, kemudian direduksi dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap demokrasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian, dan pada tahap akhir ditarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap temuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Poopo Barat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, kehidupan masyarakat Desa Poopo Barat menunjukkan praktik demokrasi yang masih kuat tertanam dalam interaksi sosial sehari-hari. Nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme politik formal, tetapi telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat yang tercermin dalam berbagai aktivitas sosial. Sikap saling membantu antara warga dalam pekerjaan rumah tangga maupun kegiatan pertanian di ladang dan kebun menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan kesetaraan yang merupakan esensi dari demokrasi sosial. Tradisi mapalus atau gotong royong yang masih kuat dipraktikkan oleh masyarakat Desa Poopo Barat mencerminkan pengambilan keputusan kolektif dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam kegiatan bersama, yang sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif.

Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Poopo Barat memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan, khususnya dalam hal pilihan politik. Menjelang dan setelah pemilihan umum, baik pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala daerah dan presiden, masyarakat tetap menghormati hak setiap individu untuk memilih pemimpin sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa memaksakan kehendak atau menciptakan konflik horizontal. Sikap saling menghargai ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah keberagaman pilihan politik masyarakat. Perbedaan pilihan politik tidak dijadikan sebagai pemicu perpecahan, melainkan dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang wajar dan harus dihormati, sehingga hubungan kekerabatan dan persaudaraan tetap terjaga meskipun memiliki preferensi politik yang berbeda.

Hasil observasi juga mengungkapkan bahwa pemerintahan desa yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya konflik besar yang muncul dari perbedaan-perbedaan yang ada. Tata kelola pemerintahan desa yang mengedepankan musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada. Dengan demikian, kehidupan warga masyarakat

terjamin kenyamanan, keamanan, dan ketertibannya karena setiap kebijakan dan program pembangunan desa diputuskan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Poopo Barat tidak hanya berfungsi sebagai sistem politik formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Demokrasi di Tingkat Desa

Hasil wawancara dengan informan TR menunjukkan bahwa masyarakat Desa Poopo Barat memiliki pemahaman yang baik tentang makna dan pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Informan TR menyatakan bahwa,

”...Desa Poopo Barat masih menganut sistem demokrasi seperti desa-desa pada umumnya, karena demokrasi mengajarkan sikap saling menghargai terutama dalam hal perbedaan pendapat. Masyarakat memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan yang berbeda, dan perbedaan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bersama. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada konteks politik formal, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan keluarga dan komunitas, di mana anak bersaudara atau anggota keluarga yang memiliki pendapat berbeda tentang suatu hal tetap dapat berkomunikasi dan bermusyawarah dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan”.

Gambar 1. Wawancara dengan TR



Sumber: data Primer

Keberadaan demokrasi di tengah masyarakat Desa Poopo Barat dipandang sangat berarti untuk menciptakan tatanan sosial yang baik dan teratur agar tidak menimbulkan masalah sosial akibat perbedaan. Informan Ibu IS menekankan bahwa,

”...demokrasi berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan perbedaan yang konstruktif, sehingga keberagaman pendapat, pilihan politik, dan kepentingan dapat diakomodasi tanpa harus mengorbankan keharmonisan sosial. Masyarakat menyadari bahwa tanpa demokrasi, perbedaan-perbedaan yang ada dapat berpotensi memicu konflik dan ketegangan sosial yang merugikan kehidupan bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak individu dipandang sebagai fondasi penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat desa”.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu IS



Sumber: Data Primer

Terkait dengan praktik demokrasi menjelang pemilihan umum, informan menyatakan bahwa demokrasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Poopo Barat berjalan dengan baik hingga saat ini. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat desa sangat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, mulai dari tingkat paling bawah seperti pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden. Masyarakat tetap berdemokrasi dengan baik tanpa saling menjatuhkan satu sama lain, meskipun memiliki preferensi dan pilihan politik yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Poopo Barat memiliki kematangan politik dan kesadaran demokrasi yang cukup tinggi, di mana kompetisi politik tidak dipandang sebagai arena permusuhan tetapi sebagai proses alamiah dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik sesuai dengan kehendak rakyat.

c. Harapan Masyarakat terhadap Keberlanjutan Demokrasi Lokal

Hasil wawancara dengan Ibu NP mengungkapkan bahwa,

”...masyarakat Desa Poopo Barat memiliki harapan besar terhadap keberlanjutan praktik demokrasi yang telah berjalan dengan baik selama ini. Informan menyatakan harapannya agar demokrasi yang ada terus berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibangun oleh masyarakat dan pemerintah desa. Harapan ini mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses yang harus terus dijaga dan diperkuat melalui komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Masyarakat memahami bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik, sehingga tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata”.

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu NP



Sumber: Data Primer

Keberlanjutan demokrasi dipandang penting karena berkaitan erat dengan efektivitas sistem pemerintahan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Informan berharap bahwa dengan demokrasi yang terus berjalan dengan baik, maka sistem pemerintahan juga dapat terlaksana dengan baik, sehingga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Harapan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang demokrasi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan substantif seperti kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan yang merata. Masyarakat menyadari bahwa pemerintahan yang demokratis cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan lebih akuntabel dalam mengelola sumber daya desa, sehingga dapat menghasilkan kebijakan dan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, masyarakat berharap agar semua warga desa terus menanamkan nilai demokrasi dalam diri masing-masing sebagai bagian dari identitas dan karakter kolektif masyarakat Desa Poopo Barat. Penanaman nilai demokrasi secara individual dipandang sebagai kunci untuk menjaga keberlanjutan praktik demokrasi di tingkat kolektif, karena demokrasi pada akhirnya bergantung pada sikap dan perilaku setiap warga dalam kehidupan sehari-hari. Harapan ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan adanya pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, terutama kepada generasi muda, agar mereka dapat melanjutkan tradisi demokrasi yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, demokrasi di Desa Poopo Barat dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersama yang harmonis dan sejahtera.

2. Pembahasan

a. Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Poopo Barat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Desa Poopo Barat tidak hanya terbatas pada aspek politik formal, tetapi telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari melalui tradisi gotong royong dan sikap saling membantu antar warga. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi sosial yang dikemukakan oleh Tocqueville (2000) yang menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan tetapi juga cara hidup masyarakat yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan partisipasi dalam kehidupan bersama. Tradisi mapalus yang masih kuat dipraktikkan masyarakat merupakan manifestasi dari demokrasi deliberatif, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Menurut Habermas (1996), demokrasi deliberatif menekankan pentingnya komunikasi dan dialog dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan legitimasi yang kuat karena didasarkan pada konsensus bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Poopo Barat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi jauh sebelum sistem demokrasi modern diperkenalkan secara formal.

Sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan pilihan politik yang ditunjukkan masyarakat Desa Poopo Barat mencerminkan kematangan demokrasi di tingkat grassroot. Dahl (1971) menjelaskan bahwa salah satu indikator demokrasi yang berkualitas adalah adanya toleransi terhadap oposisi dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, di mana perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai ancaman tetapi sebagai bagian natural dari proses demokratis. Dalam konteks Desa Poopo Barat, toleransi politik ini didukung oleh nilai-nilai budaya lokal Minahasa yang menekankan persaudaraan (*torang samua basudara*) sebagai ikatan sosial yang lebih kuat daripada perbedaan politik. Penelitian Geertz (1973) tentang budaya

politik di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai kultural lokal memiliki peran penting dalam membentuk praktik demokrasi, di mana masyarakat cenderung mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan tradisi dan norma lokal yang telah ada. Modal sosial berupa kepercayaan (trust) dan jaringan sosial yang kuat dalam masyarakat Desa Poopo Barat menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (1993) bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi berfungsinya institusi demokrasi yang efektif.

Peran pemerintahan desa yang menjalankan tata kelola sesuai nilai-nilai demokrasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa konflik besar. Menurut United Nations Development Programme (2002), good governance yang demokratis mencakup prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Poopo Barat telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa yang transparan. Hal ini sejalan dengan konsep democratic local governance yang dikemukakan oleh Manor (1999), yang menyatakan bahwa desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat jika disertai dengan kapasitas institusi yang memadai dan partisipasi masyarakat yang aktif. Keberhasilan pemerintahan desa yang demokratis dalam menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban menunjukkan bahwa demokrasi substantif telah terwujud di Desa Poopo Barat, bukan hanya demokrasi prosedural yang terbatas pada mekanisme pemilihan saja.

b. Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Demokrasi di Tingkat Desa

Pemahaman masyarakat Desa Poopo Barat tentang demokrasi yang menekankan sikap saling menghargai perbedaan pendapat mencerminkan internalisasi nilai-nilai demokrasi yang baik di tingkat individu dan komunitas. Menurut Almond dan Verba (1963) dalam konsep civic culture, budaya politik yang demokratis ditandai oleh sikap toleransi, kepercayaan terhadap institusi politik, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Masyarakat Desa Poopo Barat telah mengembangkan civic culture yang kuat, di mana nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipahami secara kognitif tetapi juga dipraktikkan dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga arena politik formal. Pembentukan budaya politik demokratis ini merupakan hasil dari proses sosialisasi politik yang berlangsung secara informal melalui interaksi sosial sehari-hari dan transmisi nilai-nilai dari generasi ke generasi. Diamond (1999) menekankan bahwa konsolidasi demokrasi sangat bergantung pada pengembangan budaya politik demokratis di kalangan masyarakat, yang ditandai oleh komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan penolakan terhadap alternatif otoriter.

Persepsi masyarakat bahwa demokrasi berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan perbedaan yang konstruktif menunjukkan pemahaman yang matang tentang fungsi substantif demokrasi dalam masyarakat plural. Sen (1999) berpendapat bahwa demokrasi tidak hanya bernilai instrumental dalam menghasilkan keputusan politik, tetapi juga memiliki nilai intrinsik dalam memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan mereka dan mengekspresikan identitas mereka. Dalam konteks Desa Poopo Barat, demokrasi dipandang sebagai instrumen untuk mencegah konflik sosial dengan memberikan ruang bagi artikulasi kepentingan yang beragam dan mekanisme penyelesaian perbedaan secara damai. Lijphart (1977) dalam teori consociational democracy menjelaskan bahwa masyarakat yang plural dapat mempertahankan stabilitas demokrasi melalui mekanisme power-sharing dan mutual veto yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok. Meskipun Desa Poopo Barat tidak menerapkan model consociational secara formal, prinsip musyawarah mufakat yang

dipraktikkan mencerminkan semangat yang sama untuk mencapai konsensus yang mengakomodasi berbagai kepentingan.

Praktik demokrasi yang berjalan baik menjelang pemilihan umum tanpa saling menjatuhkan menunjukkan adanya political maturity di kalangan masyarakat Desa Poopo Barat. Huntington (1991) dalam konsep konsolidasi demokrasi menyatakan bahwa demokrasi dapat dianggap terkonsolidasi ketika tidak ada aktor politik signifikan yang berusaha menggulingkan sistem demokratis dan masyarakat menerima demokrasi sebagai "the only game in town". Dalam konteks Desa Poopo Barat, konsolidasi demokrasi terlihat dari kenyataan bahwa kompetisi politik berlangsung dalam kerangka aturan demokratis yang disepakati bersama, dan perbedaan pilihan politik tidak mengancam kohesi sosial masyarakat. Norris (2011) menjelaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga dari bagaimana masyarakat menghormati hasil pemilihan dan menjaga stabilitas pasca-pemilihan. Sikap masyarakat Desa Poopo Barat yang tetap menjaga persaudaraan meskipun memiliki pilihan politik berbeda menunjukkan bahwa mereka telah memisahkan antara kompetisi politik dengan hubungan sosial, yang merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

c. Harapan Masyarakat terhadap Keberlanjutan Demokrasi Lokal

Harapan masyarakat agar demokrasi terus berjalan sesuai kesepakatan bersama mencerminkan kesadaran akan pentingnya komitmen kolektif dalam menjaga keberlanjutan sistem demokratis. O'Donnell (1996) dalam konsep delegative democracy memperingatkan bahwa demokrasi dapat mengalami kemunduran jika tidak ada mekanisme akuntabilitas horizontal dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks Desa Poopo Barat, kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga konsistensi praktik demokrasi menunjukkan bahwa mereka tidak ingin demokrasi hanya menjadi ritual lima tahunan tetapi harus menjadi praksis sehari-hari dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Schedler (1998) menekankan bahwa konsolidasi demokrasi memerlukan institutional crafting yang berkelanjutan, di mana aturan main demokrasi terus diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Komitmen masyarakat untuk menjaga kesepakatan bersama tentang nilai-nilai demokrasi merupakan modal penting untuk mencegah erosi demokrasi yang dapat terjadi akibat pragmatisme politik jangka pendek atau dominasi elite lokal.

Keterkaitan antara keberlanjutan demokrasi dengan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan pemahaman instrumental tentang nilai demokrasi. Sen (1999) berpendapat bahwa demokrasi memiliki nilai instrumental yang penting karena dapat mencegah bencana kemanusiaan, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Harapan masyarakat Desa Poopo Barat bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan sejalan dengan konsep developmental democracy yang dikemukakan oleh Leftwich (1993), yang menekankan bahwa demokrasi dan pembangunan ekonomi dapat saling memperkuat jika ada institusi yang efektif dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dalam konteks desa, hal ini berarti bahwa demokrasi harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang konkret, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari sistem demokratis. Booth dan Seligson (2009) menemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap demokrasi sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga pemerintah desa perlu memastikan bahwa demokrasi tidak hanya bermakna secara prosedural tetapi juga substantif.

Aspirasi masyarakat agar nilai-nilai demokrasi tertanam dalam diri setiap warga menunjukkan kesadaran tentang pentingnya civic education dan character building dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Galston (2001) menekankan bahwa pendidikan

kewarganegaraan merupakan elemen krusial dalam mempertahankan demokrasi karena mengembangkan pengetahuan politik, keterampilan partisipatif, dan karakter demokratis yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dalam konteks Desa Poopo Barat, penanaman nilai demokrasi kepada generasi muda menjadi penting untuk memastikan kontinuitas praktik demokrasi yang telah dibangun. Menurut Dewey (1916), demokrasi adalah lebih dari sekadar bentuk pemerintahan, tetapi merupakan mode of associated living yang memerlukan pembelajaran dan pembiasaan sejak dini. Transmisi nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran sosialisasi, termasuk keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan praktik pemerintahan desa yang partisipatif. Putnam (2000) mengingatkan bahwa erosi modal sosial dan civic engagement dalam masyarakat modern dapat mengancam kualitas demokrasi, sehingga upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi harus menjadi agenda berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat melanjutkan dan memperkuat tradisi demokrasi yang telah ada.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Poopo Barat terhadap demokrasi sangat positif dan mencerminkan pemahaman yang matang tentang nilai-nilai dan praktik demokrasi, baik dalam konteks politik formal maupun kehidupan sosial sehari-hari. Demokrasi di Desa Poopo Barat tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi telah terinternalisasi dalam budaya dan tradisi lokal melalui praktik gotong royong, musyawarah, dan sikap saling menghargai perbedaan. Masyarakat menunjukkan toleransi politik yang tinggi, di mana perbedaan pilihan politik tidak merusak kohesi sosial dan hubungan persaudaraan yang telah terbangun. Pemerintahan desa yang menjalankan tata kelola secara demokratis dengan mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah berhasil menciptakan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa demokrasi lokal dapat berfungsi dengan baik ketika didukung oleh modal sosial yang kuat, budaya politik yang demokratis, dan komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.

Keberlanjutan demokrasi di Desa Poopo Barat sangat bergantung pada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dan transmisi nilai tersebut kepada generasi muda. Masyarakat memiliki harapan besar agar demokrasi terus berjalan sesuai kesepakatan bersama dan dapat membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang efektif dan responsif. Integrasi antara nilai-nilai demokrasi modern dengan kearifan lokal Minahasa menjadi kekuatan unik yang memungkinkan demokrasi berkembang secara organik dan berkelanjutan di Desa Poopo Barat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika demokrasi di tingkat grassroot, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia Timur, dan menunjukkan bahwa demokrasi dapat berakar kuat ketika sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi komparatif dengan desa-desa lain di Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variasi kualitas demokrasi lokal, serta mengkaji secara lebih mendalam pengaruh teknologi informasi dan media sosial terhadap transformasi praktik dan persepsi demokrasi di kalangan masyarakat desa.

E. Daftar Pustaka

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.

- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Boston: Pearson.
- Booth, J. A., & Seligson, M. A. (2009). *The Legitimacy Puzzle in Latin America: Political Support and Democracy in Eight Nations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2001). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Galston, W. A. (2001). Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education. *Annual Review of Political Science*, 4(1), 217-234.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Leftwich, A. (1993). Governance, Democracy and Development in the Third World. *Third World Quarterly*, 14(3), 605-624.
- Lijphart, A. (1977). *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. New Haven: Yale University Press.
- Manor, J. (1999). *The Political Economy of Democratic Decentralization*. Washington DC: World Bank.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Donnell, G. (1996). Illusions About Consolidation. *Journal of Democracy*, 7(2), 34-51.
- Pratikno. (2005). Exercising Freedom: Local Autonomy and Democracy in Indonesia. In M. Erb, P. Sulistiyanto, & C. Faucher (Eds.), *Regionalism in Post-Suharto Indonesia* (pp. 21-35). London: RoutledgeCurzon.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Savirani, A., & Tornquist, O. (2015). *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia*. Yogyakarta: PolGov & PCD Press.
- Schedler, A. (1998). What is Democratic Consolidation? *Journal of Democracy*, 9(2), 91-107.

- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- United Nations Development Programme. (2002). *Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World*. New York: Oxford University Press.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- Warburton, E. (2016). Resource Nationalism in Post-Boom Indonesia: The New Normal? In S. Mietzner (Ed.), *Democracy and Islam in Indonesia* (pp. 66-89). London: Routledge.